

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Korea yang dikenal dalam sejarah sebagai negara pagi hari yang tenang sebenarnya tidak mengenal dunia luar, kecuali daratan Cina dan kepulauan Jepang. Akan tetapi, mereka berhasil mempertahankan identitasnya selama kurun waktu lima ribu tahun, hidup diantara tiga negara kuat, yaitu Rusia, Cina dan Jepang. Letak semenanjung Korea apabila dilihat dari segi geopolitis, merupakan arena percaturan politik strategi dan kepentingan militer antara negara-negara berkuasa di sekitarnya.

Dari masa akhir abad ke 19, semenanjung Korea menjadi titik strategis di Asia timur jauh dan menjadi gelanggang pertarungan internasional, terutama antara Jepang, Cina, dan Rusia. Imperialis Jepang telah memenangkan pertempuran pertamanya dengan Cina pada tahun 1895 dan yang kedua dengan Rusia 1905¹. Setelah negara lawan-lawannya berhasil di singkirkan oleh Jepang, akhirnya mereka tidak menemui lagi penghalang yang tangguh dalam usahanya untuk menjadikan negeri Korea sebagai daerah jajahannya pada tahun 1910. Sejak saat itu, negara dan bangsa Korea terpaksa diduduki oleh Jepang selama 36 tahun sampai perang dunia II berakhir pada tahun 1945. selama masa penjajahan Jepang itu berlangsung, rakyat Korea tak henti-hentinya melakukan gerakan nasionalisme anti Jepang, namun mereka dengan tangan besi menguasai seluruh kawasan Korea, mencoba mencabut semangat bangsa Korea untuk merdeka,

menggabungkan seni budaya Korea dengan milik mereka dan sebagainya. Jepang secara resmi menjadikan Korea sebagai wilayah jajahannya. Penjajahan yang berlangsung selama 35 tahun itu memberikan pengaruh yang ambivalen bagi rakyat Korea.

Di satu sisi, 35 tahun masa penjajahan Jepang adalah munculnya modernisasi di Korea, termasuk pertumbuhan kota, perdagangan, industri, serta media massa, seperti radio dan bioskop. Tidak sebagaimana sebagian besar penjajah Eropa yang ingin menguras habis-habisan kekayaan koloninya, Jepang malah mendorong pembangunan industri di Korea. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, Korea menjadi negara paling modern kedua di Asia setelah Jepang².

Di sisi lain, Jepang melakukan represi militer yang keras sehingga menimbulkan korban jiwa di pihak Korea. Tentara Jepang menjadikan rakyat Korea sebagai pekerja paksa atau tentara untuk bertempur membela Jepang serta melakukan pelecehan terhadap puluhan ribu perempuan Korea³, yang dalam hal ini tentu saja menyebabkan ketimpangan dan penjajahan perempuan. Pada akhirnya ketimpangan dan penjajahan perempuan ini telah menyebabkan diskriminasi perempuan.

Permasalahan perempuan menjadi permasalahan global negara-negara dunia, tidak terkecuali Korea Selatan. Penjajahan Jepang menjadi awal mula lahirnya ketimpangan yang menyebabkan perempuan terpinggirkan,

Selatan pun belum mendapatkan hak-haknya secara layak. Tatanan masyarakat masih menganggap bahwa perempuan mempunyai posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan sosial masyarakat, salah satu gejala sosial yang cukup mendapat perhatian ialah masalah ketidakadilan gender. Perbedaan yang jelas antara konsep jenis kelamin (sex) telah melahirkan ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan.

Permasalahan perempuan bukan merupakan persoalan suatu kelompok masyarakat tertentu saja atau permasalahan satu negara. Permasalahan perempuan yang mencakup penindasan perempuan, eksploitasi, dan tekanan sosial juga bukan semata-mata milik masyarakat Arab atau masyarakat Timur Tengah, Afrika atau negara-negara “dunia ketiga”. Semuanya merupakan bagian integral dari sistem politik, ekonomi dan budaya yang berpengaruh besar dalam hampir seluruh negara di dunia-baik sistem itu melingkupi masyarakat terbelakang dan masih bersifat feodal, atau yang mewarnai masyarakat industri modern yang menyerah kepada pengaruh revolusi sains dan teknologi. Tidak terkecuali negara Korea Selatan yang merupakan negara bekas jajahan dan pernah terlibat konflik perang. Diskriminasi terhadap perempuan menjadi sebuah keniscayaan.

Korea merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia timur laut dan merupakan sebuah negara yang tua yang terletak di belahan bumi bagian

timur laut. Negara Korea dalam berabad-abad sejarahnya, merupakan negara yang sangat penting di kawasan tersebut sebagai negara yang menghubungkan Asia timur laut dengan dunia luar, terutama dengan kepulauan Jepang yang letaknya dekat sekali dengan semenanjung Korea. Semenanjung Korea yang luasnya kira kira sama dengan Inggris, terletak antara 33° 06' dan 43° lintang utara serta antara 124°, 52' bujur timur. Panjang semenanjung Korea dari ujung utara ke ujung selatan kira kira 1000 km, yang kurang lebih sama dengan panjang pulau Jawa dari ujung timur ke ujung barat, sedangkan lebarnya pada daerah tersempit adalah 216 km. Posisi geografis semenanjung Korea yang strategis menyebabkan Korea dalam sepanjang sejarahnya, mempunyai arti penting dari sudut strategi. Hal ini karena, seperti halnya negara Israel di tengah kawasan Timur Tengah dan Singapura di tengah lautan Malay, semenanjung Korea terletak di tengah tiga negara besar, yaitu Jepang, Cina, dan Rusia. Bahkan, pada akhir masa abad ke-19 Amerika juga memberikan pengaruhnya ke tanah Korea⁵.

Korea merupakan sebuah negara di kawasan Asia yang sebelumnya pernah dijajah Jepang. Sebagai negara bekas jajahan, Korea tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Perbedaannya, ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang bisa dikatakan penjajah paling kejam diantara penjajah sebelumnya, melebihi penjajah Belanda yang sudah menanamkan kekuasaannya hampir kurang lebih 350 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang pada waktu itu sangat merugikan rakyat Indonesia. Sedangkan di Korea, 35 tahun masa penjajahan Jepang adalah periode munculnya modernisasi di Korea, termasuk

⁵ Yang Seung Yoon, *Seputar Kebudayaan Korea*, Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 3.

perang adalah sebuah bentuk kekerasan yang menjadi sebuah kepastian dimana perempuan dan anak-anak selalu dirugikan.

Keadaan dan persoalan perempuan dalam masyarakat manusia kontemporer lahir dari perkembangan dalam sejarah yang membuat suatu kelas menguasai kelas lain dan laki-laki menguasai perempuan. Mereka adalah produk kelas dan seks.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fakih, selama ini perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah.⁶ Adanya anggapan bahwa perempuan itu *irrasional* atau *emosional* sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Dalam pandangan feminisme, selama ini perempuan telah terpinggirkan. Laki-lakilah yang dianggap dominan yang berada di pusat. Perempuan hanya sebagai *konco wingking* atau dalam istilah bahasa Jawanya "*swargo numut neroko katut*". Falsafah semacam ini bukan semata-mata milik orang Jawa. Dimanapun adanya masyarakat jika ia mempunyai tradisi, maka falsafah tentang perempuan akan selalu diadakan. Semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu membatasi peran perempuan.

Marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan memang telah dikonstruksikan oleh masyarakat dengan adanya *stereotype* (pelabelan) yang dikaitkan dengan kondisi fisik laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, kondisi

⁶ Fakih, M. (1998). *Perempuan dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

fisik ini mempengaruhi konsep pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikonsepsikan bekerja di luar rumah (sektor publik) karena menganggap bahwa tantangan yang dihadapi di wilayah publik sangat besar. Laki-laki harus berhadapan dengan sesama manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Di lain pihak, perempuan sebagai sosok yang *distereotipkan* lemah, dikonsepsikan bekerja di dalam rumah yang menyangkut urusan rumah tangga (sektor domestik). Ironisnya, pembagian peran di sektor domestik dianggap lebih rendah dari pada pekerjaan laki-laki di sektor publik karena tidak menghasilkan keuntungan materi.

Senada dengan hal di atas, Haryatmoko, mengemukakan bahwa ketika perempuan masuk dalam dinamika laki-laki, dia tunduk di dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan laki-laki⁷. Sering didengar ketika seorang istri mengatakan bahwa suaminya setuju ketika ia meneruskan karirnya. Seakan-akan bagi perempuan, menekuni profesi itu menjadi mungkin karena belas kasih sang suami. Mengapa justru tidak mengandaikan yang sebaliknya bahwa melalui profesinya itu perempuan mencapai pemenuhan diri. Pembalikan seperti itu menjadi jelas bahwa perjuangan untuk kesetaraan perempuan dengan laki-laki tidak bisa berhenti pada pemenuhan hak-hak perempuan, perlakuan yang adil, tetapi harus sampai pada pembongkaran sistem penindasan itu sendiri yaitu dominasi laki-laki, yang disebut kekerasan simbolik.

⁷Haryatmoko. *Dominasi Laki-Laki Melalui Wacana*. Dalam Nur Iman Subono (ed.) *Feminis*

Diskriminasi tersebut tampak jelas dari pengalaman lingkup publik bahwa subjek pembicara didominasi oleh laki-laki. Kalau laki-laki mendominasi, maka acuan pada dunia yang ingin digambarkan atau direpresentasikan tentu sesuai dengan keinginan dan cara pandang laki-laki. Dalam konteks ini orang berbicara mengenai ideologi *phallogentrisme*, laki-laki menjadi pusat dan kriteria segala sesuatu. Ciri *phallogentrisme* ini lebih terasa dalam hubungannya dengan peran dominasi yang terkait dengan hirarki suatu organisasi sosial. Biasanya apa yang ditafsirkan dan mendapat pembenaran dari ideologi adalah hubungan kekuasaan. Maka tidak mengherankan masalah pemuka agama perempuan, pemimpin politik perempuan, menjadi isu yang hangat dan mengundang reaksi keras terutama laki-laki⁸.

Lebih lanjut, Abu Zayd menambahkan bahwa ketika perempuan dikatakan mempunyai posisi sejajar maka yang dimaksud adalah kesejajaran yang diukur dengan parameter laki-laki⁹. Perempuan diperbolehkan untuk bekerja sama, maka yang dimaksud ialah bahwa ia mengabdikan kepada laki-laki. Dalam setiap keadaan, laki-laki menjadi pusat gerak dan aktivitas. Seakan-akan hal itu merupakan takdir metafisik yang tidak bisa didekonstruksi dan diubah. Seakan-akan fase otoritas perempuan di dalam masyarakat tertentu, dan setiap aktivitas perempuan di dalam

⁸ Haryatmoko. 2001. *Dominasi Laki-Laki Melalui Wacana*. Dalam Nur Iman Subono (ed.) *Feminis Laki-Laki Solusi atau Persoalan?* Jakarta: Jurnal Perempuan. 2001. hlm. 19.

⁹ Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*

kehidupan sosial, kebudayaan, dan politik adalah aktivitas pinggiran yang tidak bisa diungkapkan maknanya kecuali melalui aktivitas laki-laki.

Pada saat sekarang, ternyata perempuan Korea masih belum berubah posisinya walaupun dalam tingkat-tingkat tertentu perempuan Korea sudah mendapatkan hak-hak yang sama seperti laki-laki. Namun, hal itu bukan jaminan bahwa perempuan Korea sudah tidak termarginalisasikan. Pada kenyataannya, perempuan masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan laki-laki.

Ada sebuah kasus menarik yang menyangkut kultur kebudayaan negara Korea yang berkaitan dengan pembedaan anak laki-laki dan perempuan. Dalam budaya Korea, ketika bayi lahir selama paling sedikit tiga minggu sanak keluarga dan handai taulan tidak diijinkan untuk menjenguk sang bayi, biasanya pada pintu masuk rumah mereka digantungkan cabai merah yang dikeringkan dan arang yang diikat dengan seutas tali jerami. Cabai merah berarti anak yang dilahirkan adalah anak laki-laki, sedangkan hanya arang saja berarti anak yang dilahirkan adalah anak perempuan. Karena sepanjang masa kerajaan Lee posisi kaum lelaki jauh lebih penting dan unggul dari pada kaum perempuan. Oleh karena itu kakek dan nenek akan merasa lemas bila anak yang dilahirkan ternyata bayi perempuan. Pada posisi kakak laki-laki sulung dalam keluarga sangat berkuasa dalam mengajarkan derajad keluarga pada adik-adiknya¹⁰.

Fenomena di atas merupakan fenomena yang nyata-nyata terjadi dalam kultur budaya Korea. Sekilas tampaknya tidak ada yang salah dengan semua itu

¹⁰Yang Seung Yoon. *Seputar Kebudayaan Korea*. Yogyakarta: Gadjah Mada university press.1995.hlm.65.

karena anggapan selama ini kultur budaya tetaplah kultur budaya dan tidak perlu dipersoalkan dan pada akhirnya juga tidak perlu untuk dipertanyakan. Namun ada hal yang menarik yang berkaitan dengan konsep perbedaan laki-laki dan perempuan. Kelahiran anak laki-laki yang ditandai dengan digantungkannya cabai merah dan kelahiran anak perempuan yang ditandai dengan digantungkannya arang hitam adalah perbedaan yang nyata bahwa masyarakat Korea masih membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Cabai merah sebagai simbol sesuatu yang baik dan arang hitam sebagai simbol sesuatu yang buruk. Apalagi hal ini diperkuat dengan sikap yang memandang ketidakberuntungan jika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan.

Kasus lain terjadi menimpa buruh perempuan Korea Selatan. Selain upah tenaga kerja yang timpang, ternyata ada kasus menarik lainnya yang berbau diskriminasi terhadap perempuan. Han menyatakan dalam *sad history of the woman factory workers* bahwa kondisi buruh perempuan Korea Selatan sangat mengenaskan, misalnya para perempuan itu ketika bekerja tidak diperbolehkan ke kamar kecil secara bebas. Hal itu berbeda sekali dengan laki-laki yang bisa keluar masuk seenaknya di kamar mandi¹¹.

Sepertinya ada anggapan bahwa jika perempuan terlalu sering ke kamar mandi maka produksi kerja akan menurun. Jika dilihat disini, perempuan sepertinya harus kerja terus-menerus tanpa berhenti bahkan untuk menyalurkan hajat sekalipun. Padahal jika ditelaah, tidak ada efek signifikan jika perempuan sering pergi ke kamar kecil. Apalagi jika hak seperti ini dengan leluasa diberikan

¹¹ Han, *Sad History of the Woman Factory Workers*, p. 100.

pada laki-laki. Seharusnya perempuan diberikan hak yang sama seperti hak yang diberikan kepada laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dan seimbang untuk menyalurkan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia.

Tidak ada yang bisa mencegah persamaan hak hanya dikarenakan seseorang itu perempuan atau laki-laki. Ironis jika hal itu dibiarkan secara berkepanjangan karena akibat dari diskriminasi terhadap perempuan Korea Selatan cukup besar dibandingkan dengan sebab yang dilahirkan. Jika hal itu dibiarkan secara terus menerus maka perempuan Korea Selatan akan mengalami traumatis yang berkepanjangan. Perasaan bahwa perempuan harus selalu mengalah, termarginalisasi akan terus menghantui yang pada akhirnya akan bermuara dengan ketidakseimbangan tatanan sosial masyarakat. Perempuan tidak akan berkembang optimal dan memaksimalkan potensinya untuk memajukan kaum perempuan pada khususnya dan masyarakat, bangsa dan negaranya pada umumnya.

Seperti halnya di atas, kultur sosial dan budaya Korea juga meranibah pada ranah yang lain. Hal itu menarik untuk diteliti karena perempuan sebagai warga yang mendominasi sebagian besar masyarakat dunia pada dekade terakhir ternyata masih belum mendapatkan hak-haknya secara layak. Hal itu disebabkan struktur masyarakat belum memberikan pengakuan sepenuhnya terhadap posisi perempuan dalam strata sosial masyarakat. Sedangkan Korea sebagai negara kawasan Asia yang selama ini mempunyai hubungan bilateral cukup baik dengan Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai keunikan sosial masyarakat tersendiri yang menarik untuk dikaji pula.

Menurut Wardana, kata perempuan dianggap jauh lebih mulia di bandingkan wanita¹³. Alasan yang dikemukakan, dalam kata perempuan terkandung anasir “empu”, sementara empu sebagaimana dijabarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna penghormatan, penempatan yang tinggi pada seseorang, orang yang ahli, atau gelar kehormatan yang bersejajar dengan “tuan”. Sementara kata wanita dianggap cenderung bernuansa minor atau negatif sebagaimana adanya ungkapan Wanita Tuna Susila (WTS) alias pekerja seksual.

Berdasarkan hal di atas, sudah menjadi hal yang semestinya jika perempuan mendapatkan pengakuan penuh sebagai layaknya perempuan. Bukan saatnya lagi perempuan harus menerima diskriminasi. Namun, terkadang kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan konsep perempuan Korea yang ternyata juga masih termarginalkan (terdiskriminasi). Perempuan Korea Selatan walaupun dalam tatanannya berbeda dengan perempuan Indonesia tetapi dalam konsep-konsep tertentu masih sama-sama belum berhak atas diri mereka sendiri.

Diskriminasi politik yang terjadi di Korea Selatan dapat dilihat dalam hal ketidasetaraan gender tahun 2002 tentang minimnya partisipasi perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan panggung politik Korea Selatan. Jika dilihat dalam prosentase perempuan berdasarkan total kursi di parlemen dan tingkat kementerian, masih menunjukkan angka yang memprihatinkan di negara

¹³Wardhana, Veven Sp. 2002. *Purnografi dan Media: Yang Bukan Perempuan (Tak) Ambil*

Korea Selatan adalah 5,9% (parlemen) dan 6,5% (kementrian). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Korea Selatan masih terdiskriminasi dari segi politik¹⁴.

2. Teori Sistem Politik

Dalam upaya mengatasi permasalahan diskriminasi perempuan, pemerintah dalam negeri Korea Selatan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mengembangkan atau menegakkan “negara kesejahteraan” (*welfare state*) demi kepentingan keadilan sosial serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Kebijakan tersebut merupakan sebuah sistem politik yang memiliki ciri-ciri tertentu. Sistem politik itu mencakup semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat¹⁶. David Easton memaparkan bagan ciri-ciri tersebut dengan rumusan sebagai berikut.

Sistem politik mencakup semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat; dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk dalam sistem politik, sehingga secara otomatis akan dipandang sebagai variabel eksternal didalam lingkungan sistem tersebut.¹⁷

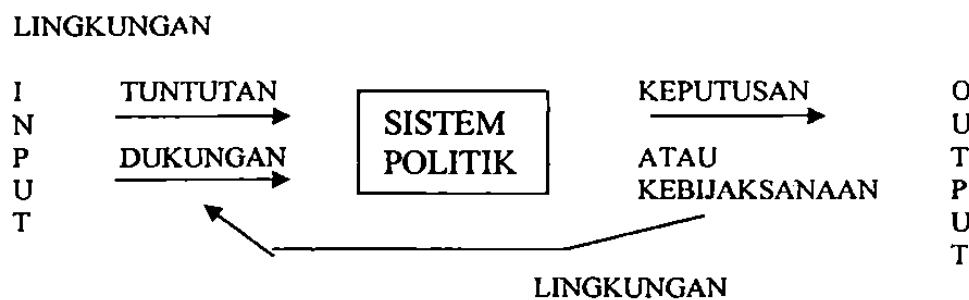
Bahwa yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem itu

¹⁴ [Http://www.IdeaInt/Publication/VIP/Upload/Chapter6.pdf](http://www.IdeaInt/Publication/VIP/Upload/Chapter6.pdf)

¹⁵ Yang Seung-Yoon dan Mas'od Mohtar, *Masyarakat, Politik, dan Pemerintahan Korea: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press. 2003. hlm.17.

¹⁶ Mas'od Mohtar dan Moe Andeano Galia, *Perbandingan sistem politik Masyarakat Gadjah*

menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan dimana sistem itu berada. Rumusan ini sangat sederhana tetapi juga cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hal: input __ sistem atau proses politik__ output, hubungan ini secara diagram dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Sumber Mas'ood Mohtar dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*.

Ketika perempuan merasakan bahwa diskriminasi tersebut sangat merugikan mereka, maka perempuan mulai memikirkan bagaimana mengatasi atau setidaknya meminimalisasi diskriminasi yang menimpa mereka. Mereka mulai mengadakan aksi yang menentang diskriminasi dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menolak diskriminasi perempuan. Perempuan berharap, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan mampu memahami dan memberikan solusi yang tepat untuk kesejahteraan sosial dan kesetaraan khususnya perempuan dan masyarakat pada umumnya.

Selain mengadakan aksi, perempuan Korea juga mengadakan beragam alternatif dalam rangka menanggapi diskriminasi yang menimpa mereka sebagai

seorang perempuan¹⁸. Kaum perempuan dengan serius mengantisipasi abad ke-21 yang berbeda dari abad ke-20.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan data sementara, penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut

1. Di negara Korea Selatan masih terdapat diskriminasi perempuan. Diskriminasi tersebut dapat ditemukan dalam bentuk ekonomi seperti upah tenaga kerja yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian dalam bentuk sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan bayi perempuan serta diskriminasi dalam bentuk politik seperti minimnya keterlibatan perempuan dalam percaturan politik dalam pemilihan kursi dalam parlemen
2. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi diskriminasi tersebut. Pemerintah menampung, mengolah protes tuntutan gerakan-gerakan perempuan korea menjadi kebijakan. Kemudian pemerintah menindaklanjuti dengan mengambil upaya-upaya kebijakan untuk mengatasi diskriminasi perempuan Korea Selatan. Upaya tersebut merupakan inisiatif dari perempuan yang berimplikasi pada dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang lebih memperlihatkan kesetaraan gender. Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga bekerjasama dengan negara-negara PBB dalam mengatasi permasalahan diskriminasi perempuan.

¹⁸ Mardani, Mardani, D. (2010). *Gender dan Pembangunan: Suatu Pendekatan Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Selama ini diketahui bahwa Korea termasuk negara dengan tingkat HDI (*Human Development Index*) yang masuk kategori tinggi. Namun, hal ini tidak diikuti dengan GEM (*Gender Empowerment Measure*) yang tinggi pula¹⁹. Artinya, meskipun sumber daya manusia masyarakat Korea relatif tinggi, tingkat kesetaraan gendernya belum signifikan. Di Korea masih banyak ditemukan ketidakadilan gender yang merambah dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan negara-negara lain yang terlingkup dalam PBB saling bertukarpikiran guna mengatasi diskriminasi perempuan. Semua bentuk dan upaya diatas akan lebih di rinci pada bab pembahasan berikutnya.

F. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dengan penekanan pada sosial budaya, ekonomi dan politik Korea Selatan. Setiap negara mempunyai sistem politik. Sebelum merasa siap untuk memerintah wilayahnya, seorang pemimpin harus memperoleh tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keahlian mengenai bagaimana cara memerintah rakyatnya dan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan tuntutan dan aspirasi warga negaranya .

Diskriminasi perempuan merupakan masalah dalam negeri suatu negara yang melibatkan segenap aspek kehidupan berbangsa seperti ekonomi, sosial, budaya yang pada kenyataannya dialami oleh masyarakat perempuan Asia terutama Korea Selatan yang tidak dapat di biarkan berlarut larut. Dalam

¹⁹ [http://hdr.undp.or/statistic/data/pdf/hdr04 table 26.pdf](http://hdr.undp.or/statistic/data/pdf/hdr04_table_26.pdf)

permasalahan diskriminasi perempuan, perempuan maupun pemerintah Korea Selatan harus dapat mengatasi segala bentuk masalah yang terjadi di dalam negaranya.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), data-data diperoleh, dikumpulkan dan diolah dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet (*web site*).

Sedangkan sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah bentuk diskriminasi perempuan Korea Selatan dengan menggunakan tinjauan sosial budaya dan upaya perempuan Korea Selatan maupun pemerintah untuk mengatasi diskriminasi tersebut.

G. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk diskriminasi perempuan Korea Selatan dalam tinjauan sosial budaya dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan perempuan dan pemerintah dalam mengatasi diskriminasi perempuan Korea Selatan
2. Secara teoretis, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam kaitannya dengan hubungan internasional, khususnya di bidang sosial budaya dengan spesifikasi permasalahan perempuan Korea Selatan.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah sebagai bahan masukan dalam mengatasi permasalahan perempuan Korea Selatan maupun Korea mempunyai kesetaraan sosial

budaya yang tidak jauh berbeda. Sehingga diharapkan penanganan permasalahan ini menjadi bahan masukan yang berarti. Selain itu, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami dan meningkatkan pengetahuan seputar Korea Selatan khususnya permasalahan diskriminasi perempuan.

H. Jangkauan penulisan

Jangkauan pada penulisan skripsi ini adalah pada awal pendudukan Jepang dimana mulai muncul diskriminasi terhadap perempuan Korea Selatan sampai tahun 2004. Jangkauan penulisan skripsi di luar waktu tersebut sedikit disinggung apabila masih ada keterkaitan dan relevansinya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dapat dipaparkan sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penulisan, sistematika penulisan.

Selanjutnya, pada **Bab II** disajikan mengenai Bdaya Korea Selatan yang meliputi sejarah Hakikat Budaya, Budaya Patriarki, Sistem Sosial Korea Selatan.

Dalam **Bab III** dipaparkan Bentuk Diskriminasi perempuan Korea Selatan

..... Bentuk Diskriminasi Ekonomi, Bentuk Diskriminasi Sosial, dan

Pada **Bab IV** dipaparkan mengenai Kebijakan Pemerintah Korea Selatan, Tuntutan Perempuan Mengenai Diskriminasi, dan Kebijakan Pemerintah terhadap Diskriminasi.

Kemudian, pada akhir penelitian skripsi ini ditutup dengan simpulan dan saran yang terlingkup dalam penutup, disajikan dalam **Bab V**